

## *Percepat Pemanfaatan Energi Alternatif*

Krisis politik dan militer di Afrika dan Timur Tengah kembali mengerek harga minyak dunia. Implikasinya jelas langsung kita rasakan di Tanah Air. Defisit APBN terus membengkak yang memaksa pemerintah mengoreksi besaran subsidi.

Setelah harga minyak dunia menyentuh US\$100 per barel, mulai dikaji opsi-opsi penghematan konsumsi BBM. Belakangan, kajian pemerintah tentang pengaturan konsumsi BBM tidak selalu ditanggapi positif.

Mulai opsi pembatasan harga tertinggi pertamax, menaikkan premium Rp500, hingga wacana pengaturan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi dan yang tidak, memicu diskusi panjang.

Jika sesuai jadwal, kemarin mestinya dimulai penerapan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Tetapi sejak Kamis, pemerintah sudah memastikan bahwa pemberlakuan kebijakan itu ditunda. Sebagai gantinya, Pertamina menempuh sejumlah langkah untuk menyosialisasikan ajakan menggunakan BBM nonsubsidi bagi yang berhak.

Di masalah silam, menaikkan harga BBM juga bukan perkara sederhana. Dampak ikutannya sangat luas, bahkan tidak jarang sangat serius. Maka sebagian kalangan percaya, menjadikan minyak sebagai sumber energi utama lebih banyak memicu instabilitas ketimbang stabilitas.

Momentum krisis dunia Arab yang memicu kenaikan harga minyak dunia bisa kita jadikan momentum kembali mendorong rencana pengembangan energi alternatif. Indonesia sudah seharusnya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi fosil. Sebab Indonesia memiliki alternatif sumber daya terbarukan yang melimpah seperti air, panas bumi, sinar matahari, dan angin.

Mengacu data pemerintah, dalam periode 2005-2009, pemanfaatan energi terbarukan baru sebesar 15.077 kilowatt (kw) yang berasal dari sumber tenaga surya, teknologi mikrohidro, pikohidro, dan angin. Padahal total kebutuhan energi nasional diperkirakan sekitar 70 ribu Megawatt (MW).

Bisa dikatakan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Setidaknya ada empat hal yang menjadi kendala, yakni finansial, teknologi, area, dan pasar. Tetapi yang dirasakan menjadi kendala utama adalah masalah finansial.

Pemanfaatan energi terbarukan diketahui butuh investasi awal besar. Sebab, teknologinya masih terbilang mahal dan belum berkembang secara komersial di Indonesia. Di sinilah dibutuhkan keberpihakan pemerintah.

Peran pemerintah penting, misalnya, dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Tanpa kedua hal itu, sulit mencari investor karena dalam kalkulasi bisnis, komersialisasi energi fosil lebih menguntungkan. Terlebih, energi fosil masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga energi terbarukan sulit bersaing dari segi harga.

Kebijakan yang tepat dan komprehensif di sektor ini tidak hanya mencakup sektor investasi dan finansial. Tetapi penting pula menyusun tata perundangan yang memberi panduan secara jelas dan bertahap bagi

semua pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun swasta.

Pemerintah sendiri telah menargetkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi 17 persen dari pemanfaatan energi nasional pada 2025. Ini membutuhkan kerangka aturan yang jelas. Dengan demikian progres dan pencapaian kebijakan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara terukur dan tepat sasaran.

Jika ini bisa dipenuhi, bisa menjadi rujukan penyusunan kebijakan turunan di tingkat yang lebih rendah, misalnya di tingkat pemerintah daerah.

Misalnya dalam membuat kebijakan seperti pengaturan harga sawit yang dikonversi menjadi *biofuel* atau bahan lainnya yang potensi sebagai sumber bahan energi alternatif seperti buah nyamplung, jarak pagar, dan sebagainya.